

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata Indonesia memberikan kontribusi Product Domestic Bruto (PDB) sebesar 4,05% tahun 2020, dan 4,2% tahun 2021 (Lukito, 2022). Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat berat bagi sektor pariwisata Indonesia karena dampak Covid-19 dan variannya. Jumlah wisatawan tahun 2021 menurun sebanyak 1,5 juta dari tahun 2020 yang mencapai 4,05 juta orang (Utami dan Kafabih, 2021). Debuti Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Raden Kurleni Ukur menyatakan devisa dari sektor pariwisata menyusut hampir 80 persen akibat pandemi corona. Tercatat, penyusutan devisa pariwisata menjadi US\$3,54 miliar atau sekitar Rp51,2 triliun (kurs 14.462 per dolar AS) dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 16,9 miliar (Makki, 2021).

Angka Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia semakin mengalami penurunan pada 2021, diketahui kunjungan kembali mengalami penurunan sebesar 61.57% yaitu berjumlah 1.557.530 kunjungan (Pustadin Kemenparekraf, 2021) Jawa Timur tercatat memiliki sebanyak 969 destinasi wisata, 387 wisata alam, 302 wisata budaya, 280 wisata buatan, 479 desa wisata (Disbudpar Jatim, 2021). Namun akibat pandemi Covid-19 banyak destinasi wisata yang tutup, dan melakukan re-opening secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan dari pemerintah sejak tahun lalu

Pulau Madura, merupakan pulau yang terdiri dari 4 Kabupaten di Jawa Timur yang juga melakukan eksplorasi berbagai potensi wisata untuk dikembangkan

menjadi objek wisata dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut data objek wisata dan kunjungan per Kabupaten di Pulau Madura:

Tabel 1.1.

Jumlah Destinasi dan Kunjungan Wisatawan di Madura

No	Kabupaten	Jumlah Destinasi Objek Wisata	Jumlah Kunjungan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Bangkalan	26	1.600	3.800	1.900	1.600	1.700
2	Sampang	6	53.839	61.724	71.672	123.768	314.552
3	Pamekasan	17	NA	274.524	193.019	223.334	NA
4	Sumenep	32	NA	674.175	544.623	627.343	574.183

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur (2020), Disbudparpora Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep (2022)

Table 1.1 diatas menunjukkan tingkat kunjungan wisatawan terhadap berbagai objek wisata yang ada di pulau Madura. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kunjungan berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan dan berimplikasi positif terhadap PAD.

Keseluruhan fenomena wisata yang dilakukan wisatawan, termasuk berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, serta usaha-usaha terkait bidang tersebut, didefinisikan dengan istilah pariwisata (Simanjuntak, et all, 2017).

Pariwisata desa merupakan salah satu sektor andalan yang menawarkan variasi daya tarik yang sangat besar, sehingga banyak wisatawan yang berminat untuk berkunjung. Bahkan tidak hanya wisatawan lokal yang tertarik, destinasi wisata yang beragam jenisnya mampu menarik banyak wisatawan asing untuk dating termasuk salah satunya destinasi wisata yang ada di desa-desa.

Keberadaan desa wisata di madura telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi desa berupa kontribusi keuangan desa, terbukanya lapangan kerja,

sumber pendapatan bagi keluarga, menambah variasi pekerjaan, peningkatan pengetahuan dalam bidang pengelolaan usaha pariwisata, terjalinnya interaksi sosial antarwarga serta terdapat partisipasi perempuan dan kelompok usia tua (Wahyunita dan Sujali, 2014), selain itu pengembangan desa wisata cukup memberi manfaat di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan (Fitari dan Maarif, 2017). Artinya keberadaan desa wisata telah dapat meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Namun dibalik itu, dalam perkembangannya tidak sedikit desa wisata yang mengalami permasalahan sehingga secara lambat laun tidak sedikit desa wisata yang mati suri. Salah satunya disebabkan karena tatakelola destinasi wisata yang kurang baik, bahkan tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran dalam bentuk tindakan kecurangan.

Fraud adalah suatu tindakan atau aktivitas penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku kecurangan dan mengakibatkan kerugian bagi suatu entitas ataupun pihak lain (Hall, 2009). Penipuan itu sendiri terbagi menjadi dua penipuan yaitu internal dan eksternal. Penipuan internal dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Penipuan eksternal dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi tersebut seperti pemasok (Keller & Owens, 2015).

Berbagai bentuk tindakan kecurangan mendapat banyak perhatian dan sorotan dari masyarakat akhir-akhir ini (Utari, et al, 2019). Banyak kasus kecurangan yang terjadi mulai dari tingkat yang paling rendah dalam pemerintahan yaitu desa hingga Negara. Kecurangan dapat terjadi karena adanya niat dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan entitasnya (Antoni, Diah, & Mansur, 2021). Hal tersebut akan berdampak tidak baik bagi individu lain

maupun entitas lainnya, (Sudarmanto, 2020). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2020), mengatakan terdapat the fraud tree yang terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan, dan dalam teori fraud triangle, Donald & Schuessler (1950) menyatakan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (pembenaran).

Fraud atau kecurangan ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, termasuk pengunjung pada tempat wisata. Belum ada data statistik mengenai kasus kecurangan yang terdapat di tempat wisata, namun pada kenyataannya dan tanpa kita sadari beberapa hal yang kita anggap biasa itu merupakan salah satu bentuk kecurangan di tempat pariwisata. Banyaknya tempat pariwisata mendorong banyaknya pengunjung yang datang sehingga untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, biasanya pihak pengelola maupun masyarakat akan berinisiatif untuk mendirikan sebuah usaha kecil atau memasukkan pedagang kaki lima disekitar tempat wisata. Salah satu usaha kecil yang berada di tempat wisata adalah jual beli makanan dan minuman yang menjadi ciri khas suatu daerah. Banyaknya pengunjung pada tempat wisata menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan sebuah penghasilan, namun masih banyak pedagang makanan dan minuman yang tidak mencantumkan harga pada produk dagangannya serta menjual harga produk dengan harga yang tinggi, dimana hal tersebut akan merugikan pengunjung. Selain itu, terdapat pula suatu kecurangan yang dilakukan pada tempat wisata misalnya tarif parkir yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dan harga tiket yang tidak wajar.

Selain itu, adanya penjualan tiket yang masih menggunakan kertas karcis membuka peluang adanya kecurangan. Tiket yang masih berupa kertas

terkadang disalah gunakan oleh beberapa orang, misalnya dengan sobekan karcis, seseorang dapat mengaku telah memasuki tempat tersebut atau bahkan melakukan pemalsuan tiket. Selain itu, pihak pengelola pariwisata juga dapat mempermainkan tiket wisata demi keuntungan pribadi, misalnya terdapat rombongan pengunjung namun tiket yang dikeluarkan hanya untuk beberapa pengunjung saja dan sisanya akan masuk ke kantong pengelola. Maka dari itu pencegahan terhadap kecurangan sangat perlu dilakukan.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan *Fraud Awareness*. *Fraud Awareness* adalah suatu cara yang dilakukan sebuah organisasi untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah terjadinya kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut, dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan kesadaran anti penipuan maka organisasi dapat terus berkembang dalam mencapai tujuannya (Wulandari & Nuryanto, Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan, 2018)

merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan. Kebijakan pelaporan tindakan kecurangan pada industri pariwisata menjadi suatu metode yang sering digunakan dalam upaya pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan (Othman, et all, 2015). Dalam mencegah terjadinya dapat dilakukan oleh beberapa hal salah satunya yaitu triangle fraud. Manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan budaya anti penipuan di dalam perusahaan. Graycar (2000), menjelaskan bahwa kunci pencegahan kecurangan di setiap perusahaan terkait Berlisensi di bawah Creative Common dengan pengembangan dan peningkatan

sistem internal control yang efektif. Dasar dari sistem seperti itu adalah filosofi manajemen yang peka terhadap risiko penipuan.

Elemen utama dari sistem tersebut meliputi: perekrutan staf dengan hati-hati, integritas budaya dan pencegahan kerugian dalam organisasi, dan audit secara berkala oleh audit internal. Dalam upaya mencegah penipuan AICPA (2002) menerbitkan SAS 99 berjudul Pertimbangan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, merupakan indikasi bagi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Di SAS99 dilampirkan pula pedoman bagi manajemen perusahaan dalam upaya mengurangi fraud di perusahaan mereka. Selanjutnya AICPA (2002) beserta beberapa organisasi profesi tersebut sebagai Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Financial Executives International (FEI), Asosiasi Audit dan Pengendalian Sistem Informasi (ISACA), The Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA), dan Society for Human Resource management (SHRM) mengeluarkan pedoman pengelolaan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, yang dikenal dengan Antifraud Program Management and Controls. Pedoman ini termasuk mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil untuk mencegah penipuan dalam organisasi, sebagai berikut: a) Budaya Kejujuran dan Etika; b) Proses dan Kontrol antifraud; dan c) Sesuai Proses Pengawasan.

Sejalan dengan beberapa organisasi profesi di atas (Albrecht & Albrecht, 2004) juga menyarankan beberapa program pencegahan kecurangan dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: a) Membuat a budaya kejujuran, keterbukaan, dan personel pendukung program, termasuk: (1) Mempekerjakan dan selalu memberikan pelatihan tentang kesadaran penipuan; (2) Menciptakan lingkungan kerja yang positif; (3) Menciptakan a kode etik atau kode etik; dan (4)

Memberikan pendampingan terhadap program kepegawaian. Dan B) Menghapus. Melakukan opportunity fraud, meliputi Menciptakan Pengendalian internal yang baik, Mengurangi potensi kolusi, Memberikan informasi kepada vendor mengenai kebijakan perusahaan, Untuk mengawasi personel, membuat jalur khusus pelaporan kecurangan, menciptakan ekspektasi hukum dan Audit penipuan proaktif.

Demikian juga dengan fungsi *Internal Control*, memiliki peran penting dalam manajemen risiko, hal ini dapat dilihat dari definisi baru audit internal yang dikeluarkan oleh IIA di Juni 1999, yang dengan jelas menyatakan bahwa audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya tujuan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen pengendalian (IIA, 2016)

Internal Control di defifinsikan oleh COSO (1992) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan sebagai efektivitas dan efisiensi kegiatan. Menurut OECD (2004) fungsi kunci dewan komisaris antara lain adalah meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korupsi, mencakup sistem internal control yang tepat khususnya sistem pemantauan risiko. *Internal Control* ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya.

Tujuan utama dari *Internal Control* adalah untuk mengelola pariwisata, mencapai tujuan perusahaan serta mempertahankan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Manfaat dari *Internal Control* bagi perusahaan untuk mencegah

serta meminimalisir segala bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen ataupun karyawan. Dengan *Internal Control* dan integritas yang baik akan dapat menurunkan tingkat kecurangan akuntansi dalam perusahaan (Dewi & Ratnadi, 2017).

Internal Control sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Wilopo, 2006). Oleh sebab itu kinerja karyawan dalam pengelolaan suatu organisasi lebih tepatnya kinerja karyawan dalam pengelolaan wisata desa mampu membantu dalam manajemen pemberian keputusan yang baik. Jika pengendalian internal disuatu pariwisata lemah maka pariwisata tersebut telah memberikan peluang bagi karyawan dan yang lainnya untuk melakukan suatu kecurangan (fraud). Jadi, kecenderungan fraud dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Jika *Internal Control* lemah atau tidak efektif, maka akan membuka peluang bagi karyawan untuk cenderung melakukan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa jika *Internal Control* semakin tinggi, maka *Fraud Awareness* semakin tinggi.

Begitu juga dengan penelitian (Gusnardi, 2011), menyimpulkan bahwa Peran Pengendalian Intern berpengaruh penerapan pencegahan kecurangan, meskipun pengaruh peran Pengendalian internal pencegahan fraud masih lemah. Studi lebih lanjut Troy et al. , (2009) menyimpulkan bahwa Pengendalian internal sangat penting untuk pencegahan kecurangan akuntansi. Jadi mereka menyarankan untuk auditor internal dan auditor eksternal tidak hanya melakukan

beberapa pengujian Pengendalian internal di mereka bekerja, tetapi juga untuk dapat menyelidiki cara-cara Pengendalian internal untuk menghindari penipuan.

Menurut survei Fraud Indonesia, kecurangan dapat terjadi karena lemahnya internal control dari suatu organisasi, (ACFE Indonesia, 2019). Terjadinya fraud di pariwisata disebabkan karena fraud tidak menjadi prioritas sebagai bagian dari internal control. Internal Control sengaja dibangun oleh suatu organisasi demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Namun, fungsi pengendalian internal tersebut tidak hanya terbatas dalam mencapai tujuan perusahaan namun juga dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan, (Petrascu dan Tieanu, 2014). Adanya pengendalian internal juga membantu mengarahkan karyawan untuk melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang ada dimana biasanya didukung dengan adanya evaluasi-evaluasi pada setiap bagian di organisasi sehingga hal tersebut juga dapat mencegah adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak organisasi (Muna & Haris, 2018)

Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, melainkan penipuan dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bisnis. Fraud Awareness merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kita betapa pentingnya pencegahan kecurangan (fraud) oleh semua pihak yang menjadi anggota disuatu organisasi. Dengan adanya gerakan anti fraud yang tinggi diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua anggota terhadap bahaya nya melakukan kecurangan (Wulandari & Nuryanto, 2018). Menurut (Tuanakotta, 2013)mengatakan terdapat dua konsep dalam upaya pencegahan fraud selain pengendalian internal, yaitu meningkatkan.

kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness). Sedangkan menurut Bank Indonesia anti-fraud merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan oleh semua pihak dalam organisasi.

Fraud Awareness adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan mencegah penipuan dilakukan oleh semua pihak organisasi. Dengan memiliki kepemimpinan yang baik juga didukung oleh anti-fraud awareness, diharapkan tumbuh dengan demikian mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk semua pihak melakukan kecurangan atau (fraud). Pemahaman tentang pengendalian internal dan kesadaran anti fraud perlu mempertimbangkan struktur organisasi dengan profesionalnya. Ada beberapa penelitian yang memeriksa pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. (Hermiyetti, 2010) menemukan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kecurangan baik sebagian atau keseluruhan. (Mappanyuki, et al, 2020) juga menemukan bahwa ada pengaruh internal dan signifikan dari pengendalian internal terhadap penipuan pengadaan yang sebagian secara persial atau bersamaan dengan pencegahan kecurangan pengadaan. Sementara itu (Butler, 2011) menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki efek yang signifikan namun negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Beberapa riset tentang fraud masih ditemukan perbedaan fakta, (Jalil, 2018) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sementara itu, kesadaran anti-fraud berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Melakukan penilaian risiko kecurangan secara berkala sehingga tindakan kecurangan dapat dilakukan menghapuskan. Manajemen puncak juga harus mampu menciptakan kesadaran dan pemahaman

tentang budaya anti korupsi kepada seluruh elemen dalam organisasi untuk mencegah terjadinya tipuan. Tetapi penelitian dari (Flowerastia, et all, 2021) menyatakan bahwa kesadaran kecurangan dan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan deteksi kecurangan, sedangkan pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan dan deteksi kecurangan pada perusahaan startup di Jakarta.

Pada penelitian ini peneliti akan menambahkan variabel baru yaitu prevention fraud. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2017) menyarankan untuk menambahkan variabel baru untuk penelitian selanjutnya dengan ini saya menambahkan variabel baru yaitu prevention fraud. Dari penelitian sebelumnya nya telah di lakukan oleh (Yuniarti, 2017) mengatakan bahwa pengendalian internal dan Anti-fraud awareness berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sedangkan menurut (Setiawan, 2015) mengatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud, sehingga dari kedua penelitian terdahulu terdapat hasil yang kurang konsisten antara pengaruh pengendalian internal terhadap fraud dan pengaruh anti-fraud awerness terhadap fraud.

Mendasarkan pada uraian diatas, maka dengan penelitian ini penulis berharap adanya dampak besar yang dilakukan pemerintah daerah dalam membuat sebuah kebijakan yang dapat mengangkat potensi pariwisata daerah yang ada. Sehingga jika hal tersebut tercapai maka akan mampu menciptakan ekowisata di Madura yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakatnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Internal Control berpengaruh terhadap ?
2. Apakah *Fraud Awareness* berpengaruh terhadap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Internal Control berpengaruh terhadap
2. Menganalisis Pengaruh *Fraud Awareness* terhadap

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan () yang terdapat pada tempat pariwisata di Madura, serta juga diharapkan sebagai saran pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, dan diharapkan mampu berkontribusi dan membantu penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori mengenai fraud (kecurangan), dan hal-hal yang digunakan dapat mempengaruhi prevention fraud.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan mengenai fraud (kecurangan), dan hal-hal yang diduga dapat mempengaruhi prevention fraud.

b. Bagi Tempat Pariwisata

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pengelola dan pelaku usaha pada tempat pariwisata dalam mengembangkan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan, serta dapat membantu dalam memperbaiki dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan yang baik sehingga dapat membantu dalam mencegah adanya kecurangan pada tempat pariwisata tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah meningkatkan dan mensosialisasikan tindakan anti-fraud kepada masyarakat dan mempertegas kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi adanya tindak kecurangan di tempat pariwisata serta mengevaluasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pariwisata di Madura.

d. Bagi Pengelola

Peneliti ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengelola wisata, dengan adanya penelitian ini pengelola dapat mengetahui pengaruh Internal Control, Fraud Awareness terhadap dan dapat memperbanyak wisatawan untuk datang.